LENVARI: Jurnal of Social Science
P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

Pergeseran Penghakiman Moral Warganet di Era Post-Truth: Analisis Wacana Kritis pada Kanal YouTube Denny Sumargo

Ferdista Eprin Saputra[1*], Mifdal Zusron Alfaqi [2]
[1,2]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang

Abstract
*The post-truth era influences how netizens form, legitimize, and reconstruct moral judgments within the digital public sphere. This study aims to analyze the construction and shifting nature of moral legitimacy among netizens in YouTube comments using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis and to explain its implications for digital citizenship ethics grounded in the values of "Pancasila". The study employs a qualitative approach based on Fairclough's three-dimensional model, encompassing text analysis, discursive practice, and social practice. Data were collected via web scraping from the comments sections of two videos on Denny Sumargo's YouTube channel, representing the pre-clarification and post-clarification phases of the "Yai Mim and Sahara" case. A corpus of 400 comments with the highest engagement levels was compiled, from which 24 comments were purposively selected as the primary units of analysis. The findings reveal that moral legitimacy is constructed through the representation of actors, evaluative strategies, claims to authority, and social sanctioning all of which gain collective resonance within the comments section. Shifts in the configuration of information drive changes in moral legitimacy through the reconstruction of actor representations, evolving evaluative strategies, competition among sources of legitimacy, and the negotiation of meaning via cross-platform intertextuality. This shift indicates a transition from a dominance of emotional resonance toward the emergence of epistemic reflexivity, as some netizens revise their judgments upon encountering new information. These findings demonstrate that digital vigilantism is dynamic, undergoing a reconstruction of legitimacy in response to changing information. The study underscores the importance of strengthening digital citizenship ethics rooted in *Pancasila* values alongside epistemic and discursive responsibility, as a foundation for democratic, civil, and responsible digital participation.*

Keywords:
Moral Judgment; Netizens; Moral Legitimacy; Post-Truth Era; Critical Discourse Analysis; Digital Citizenship Ethics.

Article History
Received 02 August 2026
Accepted 25 October 2026

***Corresponding Author:**
ferdista.eprin.2307116@students.um.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam ruang publik digital. Media digital tidak lagi berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam membentuk, menyebarkan, dan merespons berbagai isu sosial (Feriyansyah et al., 2026). Peningkatan akses internet di Indonesia memperluas ruang interaksi

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

digital yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan membentuk opini publik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk Indonesia yang mengakses internet mencapai 72,78% pada tahun 2024, meningkat dibandingkan 69,21% pada tahun 2023 (BPS, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena penting bagi pembentukan opini publik sekaligus menuntut masyarakat memiliki literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab (Supriyanto, 2026).

YouTube menjadi salah satu platform yang paling berpengaruh dalam membentuk komunikasi publik digital. Platform ini memungkinkan pengguna tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi makna melalui fitur komentar (Wulandari & Kusumo Habsari, 2024). Laporan Digital 2025 menunjukkan bahwa YouTube memiliki sekitar 143 juta pengguna di Indonesia atau sekitar 67,3% dari total pengguna internet nasional (DataReportal, 2025).Besarnya jumlah pengguna tersebut menjadikan kolom komentar YouTube sebagai ruang publik digital yang penting dalam pembentukan opini, evaluasi moral, dan respons masyarakat terhadap berbagai isu sosial.

Fenomena tersebut tampak pada komentar publik terhadap podcast Denny Sumargo yang membahas konflik antara Yai Mim dan Sahara. Fase pra-klarifikasi menunjukkan dominasi penghakiman moral yang cepat, emosional, dan cenderung membenarkan salah satu pihak berdasarkan narasi awal yang beredar. Fase pasca-klarifikasi memperlihatkan perubahan penilaian setelah muncul informasi baru. Sebagian warganet merevisi penghakiman sebelumnya, sedangkan sebagian lainnya tetap mempertahankan narasi awal. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penghakiman moral di ruang digital tidak bersifat tetap, tetapi mengalami rekonstruksi seiring perkembangan informasi (Galleguillos, 2022; Julianto et al., 2026). Kolom komentar YouTube berfungsi sebagai arena pembentukan, legitimasi, dan perubahan penilaian moral terhadap individu maupun suatu peristiwa.

Karakteristik tersebut berkaitan erat dengan kondisi komunikasi pada era post-truth, yaitu situasi ketika emosi, keyakinan personal, dan narasi yang dominan memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta yang telah terverifikasi (Reinhoud, 2019). Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan realitas sosial melalui pelabelan, strategi evaluatif, dan ekspresi emosional (Handayani et al., 2025). Dominasi narasi tertentu mendorong masyarakat membentuk penilaian moral sebelum proses verifikasi informasi berlangsung secara memadai (Istiqomah et al., 2025). Perubahan informasi tidak hanya mengubah pemahaman terhadap suatu peristiwa, tetapi juga mengubah legitimasi moral yang sebelumnya telah dibangun.

Fenomena tersebut menunjukkan karakteristik praktik digital vigilantism, yaitu tindakan kolektif warganet yang melakukan pengawasan, pelabelan, penghukuman sosial, dan delegitimasi terhadap individu melalui media digital (Trottier, 2017). Praktik tersebut berkembang melalui reproduksi narasi, dukungan kolektif, dan interaksi antarpengguna dalam ruang digital (Angela et al., 2024). Penghakiman moral tidak lagi menjadi ekspresi individual, tetapi berkembang menjadi mekanisme legitimasi sosial yang memengaruhi reputasi, identitas, dan posisi moral seseorang di ruang publik digital.

Kajian mengenai komentar warganet di media digital menunjukkan bahwa kolom komentar merupakan ruang penting dalam pembentukan opini dan penilaian moral. Damayanti dan Syukriyansyah (2025) menunjukkan bahwa komentar YouTube cenderung terfragmentasi ke dalam kelompok dengan kesamaan nilai. Nashiroh & Firmonasari (2024) menemukan bahwa komentar warganet membangun stigma dan pelabelan sosial melalui legitimasi agama dan

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

norma sosial. Khairiaha dan Prihatinib (2023), Putri dan Gautama (2022), serta Handayani et al., (2025) juga menunjukkan bahwa komentar media sosial menjadi arena pembentukan kritik sosial, konflik politik, dan citra tokoh publik. Fokus kajian terdahulu masih terbatas pada konstruksi wacana atau pola interaksi pada satu momentum tertentu. Mekanisme pergeseran legitimasi moral akibat perubahan konfigurasi informasi pada era post-truth belum banyak dijelaskan, terutama dalam kaitannya dengan praktik digital vigilantism dan implikasinya terhadap etika kewarganegaraan digital.

Kajian ini bertujuan menganalisis konstruksi dan pergeseran legitimasi moral warganet pada komentar dua video YouTube yang merepresentasikan fase pra-klarifikasi dan pasca-klarifikasi dalam kasus Yai Mim dan Sahara menggunakan Analisis Wacana Kritis model tiga dimensi Norman Fairclough (Fairclough, 2013). Analisis difokuskan pada representasi aktor, strategi evaluatif, dan legitimasi moral dalam teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Kebaruan kajian terletak pada penjelasan mengenai bagaimana legitimasi moral warganet mengalami pergeseran ketika konfigurasi informasi berubah. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa praktik digital vigilantism tidak bersifat statis, tetapi mengalami rekonstruksi legitimasi melalui dinamika wacana pada era post-truth. Temuan kajian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis, komunikasi digital, dan etika kewarganegaraan digital berbasis nilai-nilai Pancasila.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model tiga dimensi Norman Fairclough (Fauzan, 2016). Objek kajian berupa komentar warganet pada dua video di kanal YouTube Denny Sumargo yang membahas kasus Yai Mim dan Sahara. Kedua video dipilih karena merepresentasikan dua fase perkembangan informasi, yaitu fase pra-klarifikasi dan fase pasca-klarifikasi. Data dikumpulkan melalui teknik web scraping menggunakan YouTube Data API dengan batasan 30 hari pertama sejak masing-masing video dipublikasikan. Proses pengumpulan menghasilkan 32.392 komentar yang terdiri atas 27.876 komentar pada fase pra-klarifikasi dan 4.516 komentar pada fase pasca-klarifikasi. Tahap pembersihan data dilakukan dengan menghapus komentar duplikat, spam, komentar dari akun otomatis (bot), serta komentar yang tidak relevan dengan konteks kajian.

Korpus analitis dibentuk dengan memilih 200 komentar dengan jumlah likes tertinggi pada masing-masing fase sehingga diperoleh 400 komentar. Pemilihan berdasarkan jumlah likes didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian ini berfokus pada penghakiman moral yang memperoleh resonansi publik dalam ruang komentar YouTube. Jumlah likes digunakan sebagai indikator engagement dan visibilitas diskursif karena komentar dengan tingkat engagement tinggi cenderung memperoleh perhatian publik yang lebih besar dan berpotensi memengaruhi pembentukan serta reproduksi opini dalam ruang diskusi digital (Yang et al., 2022). Unit analisis utama dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu 24 komentar yang terdiri atas 12 komentar pada fase pra-klarifikasi dan 12 komentar pada fase pasca-klarifikasi. Pemilihan dilakukan berdasarkan kemampuannya merepresentasikan pola dominan penghakiman moral, variasi posisi wacana, serta perubahan representasi aktor, strategi evaluatif, dan legitimasi moral antara kedua fase tersebut.

Analisis dilakukan melalui tiga dimensi model Fairclough, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik social (Fairclough, 2013). Dimensi teks digunakan untuk mengidentifikasi representasi aktor, strategi evaluatif, dan legitimasi moral dalam komentar. Dimensi praktik

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

diskursif digunakan untuk menganalisis proses produksi, konsumsi, reproduksi, dan intertekstualitas wacana. Dimensi praktik sosial digunakan untuk menginterpretasikan hubungan antara perubahan legitimasi moral, dinamika era post-truth, praktik digital vigilantism, dan implikasinya terhadap etika kewarganegaraan digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Keabsahan interpretasi dijaga melalui pembacaan berulang dan triangulasi teori dengan membandingkan temuan pada ketiga dimensi Fairclough dengan konsep post-truth dan digital vigilantism.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Teks Penghakiman Moral pada Fase Pra-Klarifikasi

Pelabelan dan Representasi Aktor:

Representasi aktor pada fase pra-klarifikasi dibangun melalui pelabelan langsung, konstruksi ancaman sosial, dan pengalaman personal sebagai sumber legitimasi moral. Pola tersebut tampak pada komentar berikut.

Teks 1–3

*"Sahara ada unsur **menjebak** Yai Mim. Sahara **provokator**. Sopian teradu domba dan **provokator**. RT dan RW tidak ada fungsinya."*

*"Kita buat petisi se-Indonesia **mengusir** Bu S sama Pak S balik ke kampungnya, **bahaya** kalau ada tetangga modelan begitu."*

*"Yai Mim ini pernah beli dagangan saya di CFD Jalan Ijen. Dan sampai sekarang saya masih ingat **wejangan** beliau bahwa menjadi **orang sabar** akan membuka jalan rezeki dan urusan."*

Ketiga komentar tersebut memperlihatkan dua mekanisme representasi yang saling berlawanan, yaitu delegitimasi terhadap pihak yang diposisikan sebagai pelaku dan legitimasi terhadap pihak yang dipersepsikan sebagai korban. Teks 1 dan Teks 2 membangun identitas negatif melalui leksikon *menjebak, provokator,* dan *bahaya,* yang menggeser penilaian dari tindakan menuju karakter aktor. Kalimat deklaratif tanpa penanda keraguan membuat tuduhan tampil sebagai kebenaran yang telah mapan, sedangkan ajakan *petisi,* dan *mengusir,* menunjukkan bahwa representasi negatif berkembang menjadi legitimasi terhadap tindakan eksklusi sosial.

Teks 3 membentuk pola yang berbeda dengan menempatkan pengalaman personal sebagai sumber otoritas. Pernyataan *pernah beli dagangan saya,* dan penyebutan *wejangan,* serta *orang sabar,* membangun citra moral Yai Mim melalui kesaksian langsung. Pengalaman personal digunakan untuk menegosiasikan narasi negatif yang beredar di ruang publik digital, sehingga legitimasi tidak dibangun melalui verifikasi fakta, tetapi melalui otoritas pengalaman.

Kontras antara delegitimasi pada Teks 1–2 dan legitimasi pada Teks 3 menunjukkan bahwa representasi aktor dibentuk melalui pelabelan, generalisasi, dan pengalaman personal. Ketiga mekanisme tersebut menghasilkan distribusi legitimasi moral yang tidak seimbang dengan menempatkan sebagian aktor sebagai pihak yang kredibel dan sebagian lainnya sebagai pihak yang layak dihukum, sehingga membentuk fondasi awal penghakiman moral yang kemudian memperoleh resonansi kolektif dalam ruang komentar YouTube.

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

Konstruksi Penghakiman Moral melalui Strategi Evaluatif

Penghakiman moral pada fase pra-klarifikasi tidak hanya dibangun melalui representasi aktor, tetapi juga melalui strategi evaluatif yang mengarahkan pembaca pada posisi moral tertentu. Strategi tersebut tampak melalui penggunaan modalitas, diksi bernilai moral, dan ajakan kolektif yang berfungsi memperkuat legitimasi terhadap penilaian yang disampaikan.

Teks 4–7

*"Saya paham dengan orang yang berilmu tentang filsafat. Saya **harap** Bang Densu juga menghadirkan pengusaha rental Bapak Sopyan dan Ibu Sahara agar tidak cenderung **sepihak**."*

*"Buat para mahasiswa muridnya Yai Mim. Kalau tidak bisa menggunakan **akal** dalam menyaring **fitnah** atau fakta, minimal gunakan **adab** dengan tetap hadir di kelas beliau."*

*"Bang Densu **tidak perlu** mengundang podcast yang punya rental. Yang tidak setuju **kumpul di sini.**"*

*"Buat anak pasca yang tidak masuk saat dosennya mengajar. **Dosa** menghina guru sendiri dan lebih percaya **fitnah**."*

Keempat komentar tersebut menunjukkan bahwa penghakiman moral dibangun melalui spektrum strategi evaluatif, mulai dari evaluasi persuasif, evaluasi normatif, evaluasi direktif, hingga evaluasi religius. Teks 4 menggunakan modalitas *harap* untuk mengajukan tuntutan terhadap penyajian informasi yang lebih berimbang. Frasa *sepihak* mengalihkan fokus evaluasi dari aktor yang berkonflik menuju proses representasi informasi, sehingga penilaian diarahkan pada cara narasi diproduksi dan disajikan.

Teks 5 dan Teks 7 membangun evaluasi melalui nilai moral yang telah memperoleh legitimasi sosial. Diksi *akal*, *adab*, *fitnah*, dan *dosa* berfungsi sebagai standar normatif yang membedakan perilaku yang dianggap benar dan menyimpang. Penggunaan istilah religius dan etis memperkuat otoritas penutur dalam memberikan penilaian, sehingga penghakiman memperoleh legitimasi melalui rujukan pada sistem nilai yang telah diakui dalam komunitas.

Teks 6 memperlihatkan intensitas evaluasi yang lebih tinggi. Modalitas *tidak perlu* membatasi kemungkinan adanya alternatif tindakan, sedangkan ajakan *kumpul di sini* menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mengorganisasi dukungan kolektif. Penilaian moral berkembang menjadi upaya mobilisasi opini yang memperkuat posisi moral tertentu di ruang komentar.

Keempat komentar tersebut menunjukkan bahwa strategi evaluatif pada fase pra-klarifikasi bekerja melalui kombinasi modalitas, nilai normatif, dan ajakan kolektif. Modalitas *harap* membuka ruang negosiasi terhadap suatu penilaian, sedangkan *tidak perlu* mempersempit ruang tersebut dan mengarahkan pembaca pada posisi moral tertentu. Diksi *akal*, *adab*, *fitnah*, dan *dosa* memperkuat legitimasi moral dengan menghubungkan penilaian terhadap sistem nilai yang telah memperoleh penerimaan sosial. Strategi evaluatif tersebut membentuk hierarki legitimasi moral yang memberikan daya persuasif terhadap penilaian sebelum proses klarifikasi informasi berlangsung secara utuh, sehingga penghakiman moral memperoleh resonansi kolektif dalam ruang komentar YouTube.

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

Legitimasi Penghakiman Moral dalam Teks :

Penghakiman moral pada fase pra-klarifikasi tidak hanya dibangun melalui pelabelan dan strategi evaluatif, tetapi juga memperoleh legitimasi melalui berbagai sumber yang memperkuat kebenaran suatu penilaian. Legitimasi bekerja sebagai mekanisme diskursif yang membuat suatu penilaian tampak wajar, masuk akal, dan layak diterima oleh publik. Pola tersebut tampak pada komentar berikut.

Teks 8–12

> *"Istri Yai Mim adalah mantan pimpinan Bank Muamalat sekaligus dosen ilmu perbankan. Tutur kata dan pembawaannya sangat **elegan** dan **cerdas**."*
>
> *"**Hati-hati** jika punya tetangga **Madura**. Jangan dibaikin nanti **habis semua tanah**."*
>
> *"Saya **menduga** para sopir sudah diatur oleh Bu Sahara. Masa dibangunkan tidak sadar tetapi mendengar suara mobil langsung sadar."*
>
> *"Pak Yai dan Bu Rosida adalah pasangan yang sama-sama **cerdas**. Permasalahan ini memberikan **banyak pelajaran** bagi kita."*
>
> *"Semua yang menonton ini sebelumnya sudah terkena **framing** Sahara. Podcast ini memberikan **klarifikasi** yang utuh sehingga **tidak perlu lagi** mengundang Sahara dan Sofyan."*

Kelima komentar tersebut menunjukkan bahwa legitimasi moral dibangun melalui lima sumber utama, yaitu otoritas sosial, stereotip kolektif, rasionalitas semu, refleksi moral, dan klaim terhadap kebenaran informasi. Teks 8 membangun legitimasi melalui identitas profesional. Penyebutan *mantan pimpinan Bank Muamalat* dan *dosen ilmu perbankan*, disertai diksi *elegan* dan *cerdas*, membentuk asosiasi bahwa aktor yang memiliki status sosial tinggi lebih layak dipercaya. Kredibilitas dibangun bukan melalui bukti mengenai konflik, melainkan melalui otoritas yang dilekatkan pada identitas profesional.

Teks 9 dan Teks 10 menunjukkan mekanisme yang berbeda. Teks 9 menggunakan stereotip kolektif melalui frasa *Madura* dan *habis semua tanah* untuk menggeneralisasi karakter individu menjadi karakter kelompok. Penghakiman moral bergeser dari evaluasi terhadap tindakan menuju prasangka terhadap identitas etnis. Teks 10 menggunakan modalitas *menduga* dan pertanyaan retoris untuk membangun hubungan sebab akibat yang tampak logis, sehingga tuduhan memperoleh legitimasi melalui penalaran yang terlihat rasional meskipun tidak didukung oleh verifikasi empiris.

Teks 11 dan Teks 12 memperlihatkan legitimasi yang dibangun melalui refleksi moral dan klaim terhadap kebenaran informasi. Frasa *banyak pelajaran* menggeser konflik menjadi pembelajaran moral, sedangkan istilah *framing*, *klarifikasi*, dan *tidak perlu lagi* membentuk klaim bahwa narasi tertentu telah mencapai status kebenaran final. Klarifikasi tidak digunakan untuk membuka ruang dialog, tetapi untuk menutup kemungkinan hadirnya narasi tandingan.

Kelima komentar tersebut menunjukkan bahwa legitimasi moral pada fase pra-klarifikasi tidak terutama bergantung pada verifikasi fakta, tetapi pada kemampuan suatu wacana

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

membangun kredibilitas melalui otoritas sosial, stereotip, penalaran yang tampak rasional, refleksi moral, dan klaim terhadap kebenaran informasi. Mekanisme tersebut menentukan siapa yang diposisikan sebagai pihak yang kredibel, siapa yang diperlakukan sebagai ancaman, dan narasi mana yang memperoleh penerimaan kolektif dalam ruang komentar YouTube.

Analisis Teks Penghakiman Moral pada Fase Pasca-Klarifikasi

Fase pasca-klarifikasi menunjukkan perubahan pola penghakiman moral setelah warganet memperoleh informasi tambahan melalui podcast Denny Sumargo. Informasi baru tidak menghilangkan penghakiman moral, tetapi mengubah cara warganet merepresentasikan aktor, mengevaluasi peristiwa, dan membangun legitimasi terhadap penilaian yang mereka sampaikan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa klarifikasi tidak secara otomatis menghasilkan konsensus, melainkan membuka ruang negosiasi terhadap identitas, tanggung jawab, dan posisi moral aktor yang terlibat.

Pergeseran representasi aktor

Representasi aktor pada fase pasca-klarifikasi bergeser dari polarisasi moral menuju konfigurasi yang lebih beragam. Komentar tidak lagi sepenuhnya membagi aktor ke dalam kategori korban dan pelaku, tetapi mulai memperlihatkan sikap apatis, distribusi tanggung jawab, evaluasi terhadap kondisi personal, dan penggunaan otoritas profesional sebagai dasar representasi.

Teks 13–16

> *"Cung yang dari dulu semenjak kasus ini muncul **bodo amat**?"*

> *"Sahara dibully karena perbuatannya sendiri. Sarimim dibenci akibat kelakuannya sendiri. **Mereka sama-sama pelaku**."*

> *"Ngikutin dari TikTok. **Kayanya harus ke dokter** deh Yai Mim. **Jangan berlindung dengan kata filsafat.**"*

> *"Saya **orang psikolog**. Dari dulu sudah bilang kalau Yai Mim psikisnya **bermasalah**, tetapi malah dihujat."*

Keempat komentar tersebut memperlihatkan bahwa perubahan informasi menghasilkan rekonstruksi representasi aktor melalui empat mekanisme utama. Teks 13 menunjukkan munculnya sikap apatis melalui ungkapan *bodo amat*, yang menandai penarikan diri dari konflik dan melemahnya keterlibatan emosional. Posisi ini berbeda dari fase pra-klarifikasi yang didominasi kecenderungan mengambil posisi moral secara cepat.

Teks 14 memperlihatkan distribusi tanggung jawab yang lebih seimbang. Frasa *sama-sama pelaku* menghapus dikotomi korban dan pelaku yang sebelumnya mendominasi narasi. Penghakiman tidak lagi diarahkan kepada satu pihak, tetapi didistribusikan kepada kedua aktor sebagai pihak yang sama-sama bertanggung jawab.

Teks 15 dan Teks 16 menunjukkan pergeseran representasi menuju evaluasi personal dan otoritas profesional. Frasa *kayanya harus ke dokter* dan *jangan berlindung dengan kata filsafat* menggeser fokus penilaian dari konflik menuju kondisi personal Yai Mim, sedangkan klaim *orang psikolog* digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penutur sehingga penilaian

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

moral tampak memiliki dasar keilmuan. Klaim kepakaran berfungsi sebagai strategi legitimasi yang memperkuat otoritas penilaian.

Keempat mekanisme tersebut menunjukkan bahwa representasi aktor pada fase pasca-klarifikasi tidak lagi didominasi oleh pelabelan langsung seperti *provokator* atau *menjebak*, tetapi bergeser menuju apatisme, distribusi tanggung jawab, evaluasi personal, dan otoritas profesional. Pergeseran tersebut menandai bahwa legitimasi moral bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan mengikuti perubahan konfigurasi informasi dalam ruang komentar YouTube.

Rekonstruksi Penghakiman Moral melalui Strategi Evaluatif

Perubahan informasi setelah proses klarifikasi tidak hanya memengaruhi cara warganet merepresentasikan aktor, tetapi juga mengubah strategi evaluatif yang digunakan dalam membangun penghakiman moral. Fase pasca-klarifikasi menunjukkan bahwa evaluasi tidak lagi didominasi oleh dukungan atau penolakan secara mutlak, tetapi berkembang menjadi refleksi sosial, revisi penilaian, dan rasionalisasi melalui pengalaman personal. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penghakiman moral merupakan proses yang terus dinegosiasikan seiring berkembangnya informasi di ruang publik digital.

Teks 17–20

> *"Dari cerita mereka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa **rumah mewah bisa dibeli, tetapi tetangga yang baik adalah rezeki**."*

> *"Dari awal memang si Imin seperti **orang gila**. Omongannya **selalu** menjurus ke intim."*

> *"Mbak Sahara dan Pak Sofyan, **maafkan saya yang dulu pernah suudzon**. Semoga ke depan diberikan rezeki yang lancar dan dipertemukan dengan orang-orang baik."*

> *"Saya masih mengikuti beliau di TikTok. Perilakunya mengarah ke **skizofrenia**, mirip tetangga saya yang akhirnya diusir warga."*

Keempat komentar tersebut memperlihatkan tiga pola utama rekonstruksi strategi evaluatif. Teks 17 menunjukkan pergeseran dari penghukuman terhadap individu menuju refleksi sosial. Frasa *rumah mewah bisa dibeli, tetapi tetangga yang baik adalah rezeki* mengubah konflik menjadi pembelajaran mengenai relasi sosial, sehingga evaluasi diarahkan pada nilai hidup bermasyarakat, bukan semata-mata pada penentuan pihak yang bersalah.

Teks 18 dan Teks 20 menunjukkan bahwa evaluasi negatif tetap bertahan meskipun informasi tambahan telah tersedia. Pelabelan *orang gila*, generalisasi melalui kata *selalu*, dan frasa *mengarah ke skizofrenia* membangun citra negatif yang dilekatkan pada karakter dan kondisi personal aktor. Teks 20 juga menggunakan pengalaman personal sebagai dasar analogi, sehingga penilaian tampak rasional meskipun tidak didukung oleh diagnosis yang dapat diverifikasi. Evaluasi negatif memperoleh legitimasi melalui kombinasi stigmatisasi dan rasionalisasi pengalaman.

Teks 19 memperlihatkan bentuk rekonstruksi yang paling signifikan, yaitu revisi evaluasi moral. Ungkapan *maafkan saya yang dulu pernah suudzon* menunjukkan pengakuan

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

bahwa penilaian sebelumnya tidak lagi dipertahankan setelah munculnya informasi baru. Permintaan maaf yang diikuti dengan doa dan harapan baik menandai perubahan dari kecaman menuju empati, sekaligus menunjukkan bahwa legitimasi moral dapat direvisi ketika individu bersedia mengoreksi penilaiannya.

Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa fase pasca-klarifikasi tidak menghasilkan satu bentuk evaluasi yang seragam. Sebagian warganet mengubah evaluasinya menjadi refleksi sosial dan pengakuan atas kesalahan, sedangkan sebagian lainnya mempertahankan evaluasi negatif atau merasionalisasikannya melalui pengalaman personal. Rekonstruksi strategi evaluatif tersebut menunjukkan bahwa legitimasi moral di ruang digital bersifat dinamis dan terus berubah mengikuti perubahan informasi serta sumber legitimasi yang digunakan penutur.

Perubahan Legitimasi Moral dalam Teks

Fase pasca-klarifikasi menunjukkan bahwa perubahan informasi tidak hanya mengubah representasi aktor dan strategi evaluatif, tetapi juga mengubah dasar pembenaran yang digunakan warganet dalam menilai suatu peristiwa. Jika pada fase pra-klarifikasi legitimasi terutama bertumpu pada pelabelan, keyakinan personal, dan narasi awal, maka fase pasca-klarifikasi memperlihatkan sumber legitimasi yang lebih beragam, yaitu stigma dan stereotip, narasi korban, pengalaman mengikuti perkembangan informasi, serta refleksi kritis terhadap proses pembentukan opini.

Teks 21–24

*"Si tua sudah kena **ODGJ**. Yang muda **preman Madura**. Sama-sama problematik."*

*"Mbak Sahara bereaksi emosional karena pelecehan dan gangguan dari sebelah. **Kalian difitnah**, **dihancurkan usahanya**, dan **diganggu fisiknya."***

*"Yang mengikuti di TikTok pasti tahu **plot twist**-nya. Memang paling enak **jualan agama**."*

*"Dari kasus ini kita belajar, **jangan terlalu membela** yang benar dan **jangan terlalu menghujat** yang salah. Hidup penuh **plot twist**."*

Keempat komentar tersebut menunjukkan bahwa legitimasi moral pada fase pasca-klarifikasi tidak lagi bertumpu pada satu sumber otoritas, tetapi dibangun melalui mekanisme yang berbeda. Teks 21 mempertahankan legitimasi melalui stigma dan stereotip. Penggunaan label *ODGJ* dan *preman Madura* menyederhanakan identitas individu menjadi kategori sosial yang dianggap cukup untuk membenarkan penilaian negatif, sehingga pembenaran tidak lagi bergantung pada verifikasi fakta.

Teks 22 dan Teks 23 membangun legitimasi melalui narasi korban dan otoritas pengalaman informasi. Frasa *difitnah*, *dihancurkan usahanya*, dan *diganggu fisiknya* membentuk rangkaian penderitaan yang memosisikan Sahara sebagai pihak yang mengalami ketidakadilan, sedangkan rujukan terhadap *plot twist* dan *jualan agama* menunjukkan bahwa otoritas penilaian didasarkan pada klaim memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap. Pengetahuan lintas platform digunakan untuk membatalkan narasi sebelumnya dan membangun legitimasi baru.

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

Teks 24 memperlihatkan perubahan yang paling signifikan, yaitu legitimasi melalui refleksi kritis. Kalimat *jangan terlalu membela yang benar dan jangan terlalu menghujat yang salah* menggeser fokus dari identitas aktor menuju cara masyarakat membentuk penghakiman moral. Ungkapan *plot twist* merepresentasikan kesadaran bahwa realitas sosial dapat berubah ketika informasi baru muncul, sehingga penilaian tidak lagi diperlakukan sebagai kebenaran yang bersifat final.

Keempat mekanisme tersebut menunjukkan bahwa fase pasca-klarifikasi menghasilkan pergeseran dasar legitimasi dari keyakinan yang bersifat kategoris menuju penilaian yang lebih reflektif dan terbuka terhadap perubahan informasi. Stigma, stereotip, narasi korban, pengalaman informasi, dan refleksi kritis menjadi sumber legitimasi yang saling bersaing dalam membentuk penerimaan publik, sehingga penghakiman moral terus mengalami negosiasi mengikuti perubahan konfigurasi informasi dalam ruang komentar YouTube.

Analisis Praktik Diskursif Penghakiman Moral Warganet

Produksi, Konsumsi, dan Reproduksi Wacana pada Kanal Youtube Denny Sumargo

Pergeseran legitimasi moral antara fase pra-klarifikasi dan fase pasca-klarifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan informasi, tetapi juga oleh praktik diskursif yang mengatur bagaimana informasi diproduksi, dikonsumsi, dan direproduksi dalam ruang publik digital. Makna suatu peristiwa dibentuk melalui sirkulasi wacana yang terus mengalami rekontekstualisasi ketika informasi baru muncul dan ditafsirkan kembali oleh pengguna.

Kanal YouTube Denny Sumargo berfungsi sebagai ruang diskursif yang mempertemukan narasi awal dan narasi klarifikasi. Video pertama membentuk kerangka interpretasi awal yang mendorong munculnya pelabelan, evaluasi kategoris, dan legitimasi yang bertumpu pada informasi awal. Video kedua menghadirkan konteks baru yang mengubah cara sebagian warganet memaknai konflik, sehingga konsumsi wacana berkembang menjadi proses interpretasi ulang terhadap penilaian yang telah dibentuk sebelumnya. Munculnya komentar yang mengakui kesalahan penilaian, menyampaikan permintaan maaf, dan mengajak pengguna lain untuk tidak terburu-buru menyimpulkan suatu kasus menunjukkan bahwa klarifikasi mendorong negosiasi ulang terhadap posisi moral aktor yang terlibat.

Proses tersebut tidak berhenti pada konsumsi informasi, tetapi berlanjut pada reproduksi wacana melalui interaksi antarpengguna. Komentar dengan jumlah likes tinggi memperoleh visibilitas yang lebih besar sehingga lebih mudah dibaca, dibagikan, dan dijadikan rujukan dalam membentuk interpretasi kolektif (Yang et al., 2022). Mekanisme atensi digital yang dibentuk melalui visibilitas komentar, engagement, dan interaksi antarpengguna dapat memperkuat penyebaran narasi tertentu serta membentuk resonansi kolektif dalam ruang komentar YouTube (Auliana et al., 2026). Reproduksi wacana juga berlangsung secara intertekstual melalui hubungan antara YouTube, TikTok, dan podcast. Rujukan terhadap TikTok dan istilah *plot twist* menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai kasus dibangun melalui sirkulasi informasi lintas platform, sehingga klarifikasi tidak hanya menambahkan informasi baru, tetapi juga merekontekstualisasi narasi yang telah beredar sebelumnya. Pergeseran legitimasi moral dalam kajian ini menunjukkan bahwa perubahan opini publik terutama dipengaruhi oleh perubahan cara informasi diproduksi, diedarkan, dan dimaknai dalam ekosistem komunikasi digital.

Intertekstualitas dan Reproduksi Wacana dalam Ruang Komentar

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

Pergeseran legitimasi moral warganet tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan isi informasi, tetapi juga oleh hubungan antarteks yang membentuk pemahaman baru terhadap kasus Yai Mim dan Sahara. Komentar di YouTube tidak diproduksi secara terisolasi, melainkan dibentuk melalui keterkaitannya dengan narasi yang telah beredar di podcast, media sosial, dan platform digital lainnya(Ramadhani et al., 2025). Perubahan legitimasi moral terjadi ketika narasi baru merekontekstualisasi narasi lama dan mengubah cara pengguna memaknai peristiwa yang sama.

Fase pra-klarifikasi menunjukkan bahwa intertekstualitas masih didominasi oleh narasi awal yang berkembang melalui video pertama dan ruang komentar. Pelabelan seperti *provokator* dan *menjebak* direproduksi secara berulang sehingga membentuk resonansi kolektif yang memperkuat legitimasi terhadap penghukuman sosial. Reproduksi narasi tersebut membuat penilaian moral tampak memperoleh dukungan publik meskipun belum melalui proses verifikasi yang memadai.

Fase pasca-klarifikasi memperlihatkan perubahan ketika video kedua menghadirkan konteks baru. Komentar seperti *"maafkan saya yang dulu pernah suudzon"* (Teks 19) menunjukkan bahwa sebagian warganet merevisi penilaiannya setelah narasi lama direkontekstualisasi oleh informasi baru. Klarifikasi tidak hanya mengubah posisi moral aktor, tetapi juga mengubah posisi moral penutur yang mengakui kekeliruan penilaiannya. Pada saat yang sama, komentar seperti *"yang mengikuti di TikTok pasti tahu plot twist-nya"* (Teks 23) memperlihatkan bahwa rekonstruksi narasi berlangsung melalui hubungan lintas platform. TikTok, podcast, dan YouTube membentuk jaringan intertekstual yang memungkinkan narasi berpindah, direvisi, dan memperoleh legitimasi baru.

Ruang komentar menjadi arena reproduksi wacana karena setiap komentar dapat memengaruhi interpretasi pengguna lain. Komentar dengan tingkat engagement tinggi memperoleh visibilitas yang lebih besar sehingga lebih mudah dibaca, dirujuk, dan direproduksi. Mekanisme atensi digital memperkuat penyebaran narasi tertentu dan menciptakan kompetisi antar sumber legitimasi. Narasi awal, narasi klarifikasi, pengalaman personal, klaim kepakaran, dan refleksi kritis tidak saling menggantikan, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk penerimaan publik.

Komentar seperti *"jangan terlalu membela yang benar dan jangan terlalu menghujat yang salah. Hidup penuh plot twist"* (Teks 24) menunjukkan bahwa sebagian warganet mulai mereproduksi legitimasi moral melalui refleksi kritis terhadap proses pembentukan opini publik. Reproduksi wacana pada fase pasca-klarifikasi tidak lagi hanya memperkuat narasi lama, tetapi juga menghasilkan narasi tandingan yang menekankan kompleksitas dan ketidakpastian informasi. Pergeseran legitimasi moral dalam kajian ini menunjukkan bahwa opini publik dibentuk melalui proses intertekstualitas, rekontekstualisasi, dan reproduksi wacana yang berlangsung secara simultan dalam ekosistem komunikasi digital.

Analisis Praktik Sosial Penghakiman Moral Warganet

Pergeseran Legitimasi Moral dalam Konteks Era Post-Truth dan Etika Kewarganegaraan Digital

Pergeseran legitimasi moral yang ditemukan pada dimensi teks dan praktik diskursif menunjukkan bahwa penghakiman moral warganet tidak terutama dibentuk oleh fakta yang telah terverifikasi, tetapi oleh mekanisme produksi, sirkulasi, dan kompetisi informasi dalam ruang digital. Era *post-truth* memperlihatkan bahwa legitimasi publik semakin dipengaruhi oleh narasi, emosi, pengalaman personal, dan keyakinan subjektif, sehingga penerimaan terhadap

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

suatu penilaian sering kali mendahului proses verifikasi (Reinhoud, 2019). Kajian ini menunjukkan bahwa perubahan opini publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons terhadap bertambahnya informasi, melainkan sebagai perubahan mekanisme pembentukan dan legitimasi penilaian moral dalam ruang publik digital.

Fase pra-klarifikasi memperlihatkan bahwa narasi awal memperoleh legitimasi melalui resonansi kolektif yang terbentuk dalam ruang komentar. Pelabelan seperti *provokator* dan *menjebak* menunjukkan bahwa penghukuman sosial berkembang ketika informasi masih belum lengkap. Kecepatan sirkulasi informasi melampaui kecepatan verifikasi, sehingga narasi yang memperoleh perhatian publik lebih mudah diterima sebagai dasar penilaian moral. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi tidak terutama bergantung pada akurasi informasi, tetapi pada kemampuan suatu narasi memperoleh dukungan emosional dan reproduksi kolektif dalam ruang digital. Pada tahap ini, penghakiman moral berfungsi sebagai mekanisme penyederhanaan realitas yang mengubah ketidakpastian informasi menjadi kepastian moral mengenai siapa yang dianggap benar dan siapa yang layak dihukum.

Fase pasca-klarifikasi menunjukkan bahwa informasi baru tidak secara otomatis menggantikan legitimasi yang telah terbentuk. Sebagian warganet merevisi penilaiannya, menyampaikan permintaan maaf, dan mengakui bahwa mereka sebelumnya terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebagian lainnya tetap mempertahankan narasi awal melalui pengalaman personal, klaim kepakaran, stereotip, atau rujukan terhadap platform digital lain. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa fakta tidak bekerja secara linear dalam mengubah opini publik karena informasi baru selalu berinteraksi dengan identitas, pengalaman, dan keyakinan yang telah lebih dahulu memperoleh legitimasi. Perubahan legitimasi dalam kajian ini tidak berlangsung sebagai proses penggantian narasi, tetapi sebagai kompetisi antar sumber legitimasi yang saling bersaing memperoleh penerimaan publik.

Kompetisi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi moral pada era *post-truth* tidak lagi dimonopoli oleh satu sumber otoritas. Narasi awal, klarifikasi, pengalaman personal, klaim kepakaran, refleksi moral, dan informasi lintas platform menjadi sumber legitimasi yang saling berinteraksi dalam membentuk penilaian publik. Warganet tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memilih sumber otoritas yang dianggap paling kredibel dalam membenarkan suatu penilaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan legitimasi moral merupakan hasil negosiasi diskursif yang dipengaruhi oleh kompetisi antar narasi, distribusi atensi digital, dan kemampuan suatu wacana membangun kredibilitas di mata publik.

Temuan tersebut juga menunjukkan transformasi praktik *digital vigilantism* dalam ruang publik digital. Pada fase pra-klarifikasi, *digital vigilantism* muncul dalam bentuk pelabelan, penghukuman sosial, dan upaya eksklusi terhadap pihak yang dianggap bersalah. Pada fase pasca-klarifikasi, praktik tersebut mengalami diferensiasi. Sebagian pengguna mempertahankan penghukuman, sebagian merevisi penilaiannya, dan sebagian membangun legitimasi baru melalui refleksi kritis. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa *digital vigilantism* bukan praktik yang statis, tetapi proses sosial yang terus dinegosiasikan mengikuti perubahan konfigurasi informasi. Pergeseran dari penghukuman yang bersifat kategoris menuju penilaian yang lebih reflektif menunjukkan bahwa praktik penghukuman digital dapat mengalami rekonstruksi ketika struktur legitimasi yang menopangnya mulai dipertanyakan.

Kondisi tersebut mengungkap persoalan yang lebih mendasar, yaitu melemahnya tanggung jawab moral dalam pembentukan opini publik. Warganet memiliki kebebasan untuk menilai dan menyampaikan pendapat, tetapi penilaian tersebut sering kali diproduksi sebelum

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

proses verifikasi berlangsung secara memadai. Temuan mengenai munculnya permintaan maaf, pengakuan atas kesalahan penilaian, dan refleksi kritis menunjukkan bahwa sebagian pengguna mulai mengembangkan refleksivitas epistemik, yaitu kesediaan untuk mengoreksi keyakinan ketika informasi baru tersedia. Refleksivitas tersebut menjadi indikator penting bagi kualitas kewarganegaraan digital karena menunjukkan bahwa partisipasi digital tidak hanya berkaitan dengan ekspresi pendapat, tetapi juga dengan kemampuan merevisi penilaian berdasarkan bukti.

Implikasi kajian ini terhadap etika kewarganegaraan digital terletak pada pentingnya membangun budaya partisipasi yang menggabungkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab epistemik. Hak untuk menyampaikan pendapat perlu diimbangi dengan kesediaan memverifikasi informasi, mengevaluasi kembali penilaian ketika bukti baru tersedia, dan menghormati martabat individu dalam proses pembentukan opini publik. Pergeseran legitimasi moral yang ditemukan dalam kajian ini menunjukkan bahwa penghakiman moral di ruang publik digital selalu bersifat kontingen terhadap perubahan informasi, intertekstualitas lintas platform, dan dinamika reproduksi wacana. Temuan tersebut menegaskan bahwa tantangan utama kewarganegaraan digital pada era *post-truth* bukan hanya penyebaran informasi yang salah, tetapi juga transformasi cara masyarakat membangun, mempertahankan, dan merevisi legitimasi moral dalam ekosistem komunikasi digital Indonesia.

Digital Vigilantism sebagai Bentuk Penghakiman Moral dan Tantangannya terhadap Etika Kewarganegaraan Digital

Temuan pada dimensi teks dan praktik diskursif menunjukkan bahwa penghakiman moral warganet tidak berhenti pada penyampaian opini terhadap kasus Yai Mim dan Sahara. Komentar-komentar yang dianalisis memperlihatkan kecenderungan memberikan sanksi sosial, membangun stigma, menyerukan pengucilan, dan membentuk legitimasi kolektif terhadap pihak yang dianggap bersalah. Fenomena tersebut menunjukkan karakteristik *digital vigilantism*, yaitu praktik ketika warga digital mengambil peran sebagai penilai, penyelidik, dan pemberi sanksi sosial melalui media daring tanpa melalui mekanisme hukum atau prosedur penyelesaian yang formal (Favarel-Garrigues & Shukan, 2019). Dalam konteks ini, ruang komentar tidak hanya menjadi arena ekspresi pendapat, tetapi juga arena distribusi legitimasi yang menentukan siapa yang diposisikan sebagai pihak yang layak dipercaya, dipersalahkan, atau dihukum.

Fase pra-klarifikasi memperlihatkan bahwa *digital vigilantism* dibangun melalui resonansi emosional terhadap narasi awal. Pelabelan seperti *provokator*, *menjebak*, dan seruan untuk mengusir pihak tertentu menunjukkan bahwa penghukuman sosial berkembang sebelum proses klarifikasi berlangsung secara memadai. Penghakiman moral tidak lagi diarahkan pada evaluasi terhadap tindakan, tetapi berkembang menjadi delegitimasi terhadap identitas dan posisi sosial individu. Narasi yang memperoleh dukungan kolektif berubah menjadi dasar pembenaran bagi tindakan penghukuman, sehingga legitimasi publik terbentuk melalui sirkulasi dan reproduksi wacana, bukan melalui verifikasi fakta.

Fase pasca-klarifikasi menunjukkan bahwa *digital vigilantism* tidak menghilang, tetapi mengalami transformasi. Sebagian warganet merevisi penilaiannya, menyampaikan permintaan maaf, dan mengakui bahwa mereka sebelumnya terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebagian lainnya mempertahankan penghukuman melalui stigma kesehatan mental, pelabelan terhadap karakter individu, atau generalisasi terhadap identitas kelompok. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa *digital vigilantism* tidak semata-mata bergantung pada benar atau salahnya

P-ISSN: 2988-5353 | E-ISSN: 2988-5361
Vol 4 No 2 (2026) | Page 133-149
DOI: https://doi.org/10.61105/jss.v4i2.531

informasi, tetapi pada sumber legitimasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan menghukum. Dengan demikian, klarifikasi tidak menghapus praktik penghukuman digital, melainkan mengubah bentuk dan dasar legitimasinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa ruang komentar merupakan arena kontestasi antara penghukuman sosial dan refleksivitas digital. Komentar dengan tingkat engagement tinggi dapat memperkuat keyakinan bahwa suatu penghakiman telah memperoleh legitimasi kolektif, sedangkan komentar yang mengakui kesalahan dan mengajak pengguna lain untuk tidak terburu-buru menghakimi menunjukkan munculnya refleksivitas digital. Kontestasi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi moral di ruang digital terus dinegosiasikan melalui interaksi antarpengguna, reproduksi komentar, dan kompetisi antar narasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Implikasi temuan ini terhadap etika kewarganegaraan digital terletak pada ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab diskursif. Warga digital tidak hanya bertanggung jawab atas isi pendapat yang disampaikan, tetapi juga atas dampak sosial yang ditimbulkan terhadap individu maupun komunitas. Penghormatan terhadap martabat individu, kesediaan memverifikasi informasi, dan kemampuan merevisi penilaian ketika bukti baru tersedia menjadi prasyarat penting bagi partisipasi digital yang berkeadaban. Dalam konteks tersebut, kajian ini menunjukkan bahwa *digital vigilantism* merupakan manifestasi perubahan mekanisme legitimasi publik pada era *post-truth*, ketika penghukuman sosial dibentuk melalui kompetisi narasi, resonansi emosional, dan distribusi legitimasi dalam ekosistem komunikasi digital.

Implikasi Pergeseran Legitimasi Moral terhadap Etika Kewarganegaraan Digital Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Pergeseran legitimasi moral yang ditemukan dalam kajian ini menunjukkan bahwa ruang publik digital tidak hanya menjadi arena pertukaran informasi, tetapi juga arena pembentukan nilai, penilaian, dan penghukuman sosial. Praktik pelabelan, stigmatisasi, stereotip, penghukuman kolektif, dan penyebaran penilaian sebelum fakta terverifikasi menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali dipisahkan dari tanggung jawab epistemik dan tanggung jawab diskursif (Supriyanto, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi digital tidak hanya menghasilkan pertukaran opini, tetapi juga membentuk konsekuensi sosial yang dapat memengaruhi martabat individu, relasi sosial, dan kualitas kehidupan demokratis.

Fase pra-klarifikasi memperlihatkan bahwa legitimasi moral dibangun melalui resonansi terhadap narasi awal ketika informasi masih terbatas. Pelabelan seperti *provokator*, *menjebak*, *ODGJ*, dan stereotip terhadap identitas etnis menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya diarahkan pada tindakan, tetapi juga pada identitas dan martabat individu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital dapat mereproduksi stigma dan prasangka ketika proses verifikasi dikalahkan oleh kecepatan sirkulasi informasi. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kondisi tersebut merefleksikan melemahnya prinsip kemanusiaan yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar hubungan antarwarga.

Fase pasca-klarifikasi memperlihatkan dinamika yang berbeda. Munculnya komentar yang mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, dan mengajak pengguna lain untuk tidak terburu-buru menghakimi menunjukkan bahwa perubahan informasi dapat mendorong refleksivitas moral. Kesediaan merevisi penilaian setelah memperoleh bukti baru menunjukkan

bahwa legitimasi moral tidak selalu bersifat kaku, tetapi dapat dikoreksi melalui proses dialog, evaluasi ulang, dan keterbukaan terhadap perspektif lain. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa ruang digital juga memiliki potensi untuk membangun praktik kewarganegaraan yang lebih deliberatif.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa etika kewarganegaraan digital berbasis nilai-nilai Pancasila tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Etika tersebut juga menuntut kemampuan membangun penilaian publik yang menghormati martabat manusia, menjunjung keadilan, dan membuka ruang musyawarah dalam menghadapi perbedaan informasi (Az-zahra, 2025). Tanggung jawab epistemik tercermin dalam kesediaan memverifikasi informasi sebelum membentuk penilaian moral, sedangkan tanggung jawab diskursif tercermin dalam kesadaran bahwa setiap komentar dapat memperkuat stigma, memperluas penghukuman sosial, atau sebaliknya membuka ruang koreksi terhadap penilaian yang keliru.

Implikasi tersebut menjadi semakin penting karena kajian ini menunjukkan bahwa digital vigilantism berkembang melalui legitimasi kolektif yang dibentuk dalam ekosistem komunikasi digital. Penghukuman sosial yang memperoleh resonansi publik dapat melemahkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan dialog yang menjadi fondasi etika kewarganegaraan digital berbasis Pancasila. Sebaliknya, refleksivitas moral, keterbukaan terhadap koreksi, dan penghormatan terhadap proses verifikasi menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena pembelajaran kewarganegaraan yang memperkuat budaya demokratis.

Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama kewarganegaraan digital pada era post-truth bukan hanya penyebaran informasi yang salah, tetapi transformasi cara masyarakat membangun legitimasi moral. Penguatan etika kewarganegaraan digital berbasis nilai-nilai Pancasila memerlukan pengembangan budaya partisipasi yang mengintegrasikan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab epistemik, tanggung jawab diskursif, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keterbukaan terhadap revisi penilaian. Dengan demikian, ruang publik digital dapat berkembang sebagai ruang demokratis yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga membangun praktik komunikasi yang berkeadaban dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa penghakiman moral warganet terhadap kasus Yai Mim dan Sahara mengalami pergeseran legitimasi moral yang berlangsung melalui transformasi mekanisme pembentukan legitimasi dalam ruang publik digital. Pada fase pra-klarifikasi, legitimasi moral dibangun terutama melalui resonansi emosional terhadap narasi awal, pelabelan, generalisasi, dan penghukuman sosial ketika informasi masih terbatas. Pada fase pasca-klarifikasi, legitimasi moral tidak sepenuhnya digantikan oleh informasi baru, tetapi direkonstruksi melalui kompetisi antar sumber legitimasi, seperti pengalaman personal, klaim kepakaran, refleksi moral, dan akses terhadap informasi lintas platform. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan opini publik tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui proses negosiasi diskursif yang dipengaruhi oleh intertekstualitas, reproduksi wacana, dan dinamika atensi digital.

Analisis menggunakan model tiga dimensi Norman Fairclough menunjukkan bahwa pergeseran legitimasi moral tidak hanya tampak pada pilihan bahasa dalam komentar, tetapi

juga pada praktik produksi, konsumsi, dan reproduksi wacana yang membentuk penerimaan publik terhadap suatu narasi. Hubungan antarteks antara YouTube, TikTok, dan podcast merekontekstualisasi narasi yang telah beredar sebelumnya, sehingga legitimasi moral menjadi hasil kompetisi antar narasi dalam ekosistem komunikasi digital. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa makna, otoritas, dan kebenaran publik tidak melekat secara tetap pada suatu teks, tetapi terus dibentuk melalui sirkulasi dan negosiasi wacana.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa penghakiman moral warganet merupakan manifestasi digital vigilantism yang mengalami transformasi seiring perubahan konfigurasi informasi. Pada fase pra-klarifikasi, digital vigilantism beroperasi melalui penghukuman kolektif yang bersifat kategoris. Pada fase pasca-klarifikasi, praktik tersebut mengalami diferensiasi ketika sebagian pengguna mempertahankan penghukuman, sebagian merevisi penilaiannya, dan sebagian mengembangkan refleksivitas moral. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digital vigilantism bukan praktik yang statis, tetapi proses sosial yang bergantung pada perubahan sumber legitimasi dan kompetisi narasi dalam ruang digital.

Daftar Pustaka

Angela, L., Aulia, W., & Rahma, B. G. J. S. (2024). "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective. In *Buletin Psikologi* (Vol. 32, Issue 2, p. 113). researchgate.net. https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.97562

Auliana, N., Maharani, A. H., & Bakry, G. N. (2026). Analisis jaringan sosial dan sentimen komentar pengguna pada konten "On Marissa's Mind" di YouTube. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, *15*(1), 127–143. https://doi.org/10.35508/jikom.v15i1.9913

Az-zahra, F. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi " Strategi Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Etika Digital di Era Digital ." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(2), 332–333. https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9706

BPS. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, Nomor Publikasi 06300.25007. In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.

Damayanti, A., & Syukriyansyah. (2025). Moral Discourse and Network Fragmentation in YouTube Comments. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, *4*(2), 212–229. https://doi.org/10.59408/jnk.v4i2.124

DataReportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia

Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis the critical study of language, second edition. In *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language, Second Edition* (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315834368

Fauzan, U. (2016). Analisis Wacana Kritis: Menguak Ideolologi Dalam Wacana. In *Idea Press*. Idea Press. http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ls/article/view/2087

Favarel-Garrigues, G., & Shukan, I. (2019). Perspectives on Post-Soviet Vigilantism. Introduction. *… : Russian Review of Social …*. https://sciencespo.hal.science/hal-02951123/

Feriyansyah, Murtiningsih, S., & Nugroho, H. W. (2026). Digital Citizenship in the Dynamics of Post-Digital Education. *Jurnal Kewarganegaraan*, *23*(1), 48–69. https://doi.org/10.24114/jk.v23i1.69367

Galleguillos, S. (2022). Digilantism, discrimination, and punitive attitudes: A digital vigilantism model. *Crime, Media, Culture*, *18*(3), 353–374. https://doi.org/10.1177/17416590211017937

Handayani, M. R., Rahmi, A., Hilmi, M., & Chairullah, D. (2025). Critical discourse analysis of netizens' comments on the 2024–2029 presidential and vice-presidential debate based on a corpus. *Islamic Communication Journal*, *10*(1), 69–90. https://doi.org/10.21580/icj.2025.10.1.26055

Istiqomah, Sastia, M., Gultom, E. S. B., & Rangkuti, R. (2025). The Language of Shame in Cyber Discourse: A Critical Discourse Analysis of Gendered Moral Policing on X Media. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, *9*(2), 382–385.

Julianto, E. N., Aristyavan, I., Pellu, M. N., YF, S. R., & Sudarmanto, B. (2026). Post Truth Society dan Literasi Digital: Analisis Peran Mafindo Dalam Melawan Hoaks, Diisinformasi dan Misinformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, *5*(1), 349–388. https://doi.org/10.58540/jipsi.v5i1.1508

Khairiah, I., & Prihatini, A. (2023). Kritik Sosial dalam Animasi Tekotok: Analisis Wacana Kritis Van Dijk. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, *7*(2), 329–349. https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.26549

Nashiroh, T. S., & Firmonasari, A. (2024). Stigmatisasi terhadap individu childfree dalam komentar Youtube: analisis wacana kritis. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, *7*(2), 237–246. https://doi.org/10.30872/diglosia.v7i2.950

Putri, S. K., & Gautama, M. I. (2022). Interaksi Sosial di Dunia Digital (Analisis Wacana Kritis terhadap Kolom Komentar Podcast Close The Door di Channel Youtube Deddy Corbuzier). *Jurnal Perspektif*, *5*(2), 180–189. https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i2.611

Ramadhani, M. F., Anastasia, V., & Belinda, B. (2025). Analisis Wacana Kritis Narasi Video dan Komentar terhadap Pengungsi Rohingya di YouTube. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *12*(2), 248–272. https://doi.org/10.21009/COMM.033.05

Reinhoud, E. (2019). *The Post-Truth Era: Crises of Truth in (Post-)Postmodern Literature*. studenttheses.uu.nl. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/384022

Supriyanto, A. (2026). Integrasi Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn untuk Pembentukan Digital Citizenship di Era Society 5.0. *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(2), 29–36.

Trottier, D. (2017). Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. *Philosophy and Technology*, *30*(1), 55–72. https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4

Wulandari, N. L. W., & Kusumo Habsari, S. (2024). Social Critique and Cancel Culture: Analyzing Online Comments on Gisella Anastasia's Video with Foucault's Approach. *The Journal of Society and Media*, *8*(2), 612–639. https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p612-639

Yang, S., Brossard, D., Scheufele, D. A., & Xenos, M. A. (2022). The science of YouTube: What factors influence user engagement with online science videos? *PLoS ONE*, *17*(5 May), e0267697. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267697